

PERKEMBANGAN PEMAHAMAN RADIKALISME DI INDONESIA

Imran Tahir*, M. Irwan Tahir
Email: imranthahir@gmail.com

Abstract

Radicalism is a threat to the security and peace of a community, even a threat to the survival of a nation. Experience in a number of countries shows that radicalism can encourage conflict, both horizontally and vertically. Radicalism can be interpreted as positive or negative or constructive and descriptive. Radicalism is positive or constructive if it is lined with tolerance or restraint in society. In Indonesia, the danger of negative radicalism is evident when many young people are exposed to ideas that lead to violence.

Keywords: Radicalism, Positive Radicalisme, Negative Radicalisme.

PENDAHULUAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastic. Sementara Sartono Kartodirdjo mengartikan radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa (Kartodirdjo, 1985:38). Radikalisme menurut KBBI diartikan pula sebagai cara berpikir. Sedangkan sejarawan Sartono Kartodirdjo mengartikannya sebagai gerakan sosial. Mohammad Hasan Khalil membedakan antara radicalism dan violent radicalism. Sebagai paham ia bersifat umum, tetapi ketika paham ini diturunkan menjadi tindakan, maka Khalil merujuk pada tindakan Osama bin Laden pada peristiwa pemboman Menara Kembar di New York 9 September 2001 (Khalil, 2018:33-61). Radikalisme merupakan ancaman bagi keamanan dan kedamaian kehidupan bermasyarakat, bahkan ancaman bagi kelangsungan sebuah bangsa. Pengalaman di sejumlah negara menunjukkan bahwa radikalisme dapat mendorong timbulnya konflik, secara horizontal maupun vertikal. Radikalisme dipahami secara beragam bergantung kepada orang atau kelompok yang mendefinisikannya atau kepada perspektif yang digunakan.

Dalam kenyataan kehidupan keagamaan sehari-hari, radikalisme diperlihatkan sebagai gerakan-gerakan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan penggunaan kekerasan yang didasarkan pada alasan atau jargon-jargon keagamaan (Hasbiyallah, 2016). Secara umum, radikalisme dapat dimaknai sebagai pemahaman dan atau perilaku menggunakan kekerasan dalam mensikapi perbedaan, memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Perlu pengkajian secara intensif dan komprehensif untuk membuat batasan yang jelas, sehingga dijadikan rujukan bersama dalam pembahasan radikalisme.



Realita radikalisme cukup mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai. Munculnya berbagai tindakan kekerasan yang dilatari oleh berbagai sebab, mengindikasikan masih suburnya radikalisme. Tindakan kekerasan oleh sekelompok orang kepada kelompok lain, tindakan main hakim sendiri oleh seseorang maupun sekelompok dan tindakan anarkis dalam mensikapi perbedaan yang ada di masyarakat serta tindakan anarkis dalam menyatakan pendapat, merupakan fakta-fakta yang masih kita lihat di masyarakat saat ini. Sebuah hasil survei menyatakan bahwa Potensi Radikalisme masyarakat menunjukkan angka yang perlu diwaspadai yaitu 58,0 pada rentang 0 sampai 100 (BNPT, 2017). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat potensi radikalisme tersebut berada pada kategori Potensi Sedang. Potensi Radikalisme ini tercerminkan dari tiga dimensi yaitu Potensi Pemahaman Radikal yang berada pada angka 63,44 (Potensi Kuat), Potensi Sikap Radikal pada angka 60,25 (Potensi Sedang), dan Tindakan Radikal 48,98 (Potensi Sedang).

Salah satu jalan keluar untuk mengatasi potensi radikalisme adalah melakukan penangkalan terhadap paham radikalisme. Terdapat enam variabel yang dapat berfungsi sebagai daya tangkal terhadap potensi radikalisme yaitu kesadaran hukum, kesejahteraan, pertahanan dan keamanan, keadilan, kebebasan, dan kearifan lokal. Dari keseluruhan variabel tersebut, ada dua variabel yang menunjukkan keterkaitan yang paling kuat yaitu kesejahteraan, pertahanan dan keamanan. Hasil penelitian menyebutkan “Variabel laten Kesejahteraan (X2), dan Pertahanan dan Keamanan (X3), secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan negative (daya tangkal) terhadap potensi Radikalisme (Y), dengan kategori daya tangkal yang berada pada kategori Kuat”. Upaya menangkal potensi radikalisme secara formal dilakukan pemerintah. Pemerintah dengan program-program pembangunan infrastruktur dan mental terus bekerja. Sementara partisipasi aktif masyarakat untuk menangkal paham radikalisme juga turut berlangsung. Julia Day Howell melihat sufisme perkotaan menjadi alternatif di Indonesia (Howeel, n.y:165-178). Howell melihat peran positif partisipasi masyarakat dengan menceritakan peran juru dakwah seperti Aa Gym – KH. Abdullah Gymnastiar, Ary Ginanjar Agustian atau Arifin Ilham. Ketiganya menggunakan metode sufi perkotaan dengan menggunakan media yang berbeda. Arifin Ilham menggunakan media televisi dalam berdakwah. Aa Gym menggunakan televisi dan pertemuan publik. Sedangkan Ary Ginanjar melakukan dakwah langsung ke kelas menengah dan elit di ruang-ruang tertutup. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan juga ditemukan dengan budaya lokal yang dapat menjadi sumber pencegahan. Betawi misalnya dikenal dengan kesiapan menerima pluralitas dan keberagaman. Di Ambon terdapat adat pela gedong yang mempersatukan. Di Manado kita temukan banyak spanduk-spanduk besar dengan tema “Torang Semua Basodara”.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Creswel. Bagi peneliti kualitatif, satu-satu realitas dibangun oleh individu yang terlibat dalam situasi penelitian dengan beberapa realitas yang ada dalam situasi tertentu. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan studi dokumentasi seperti



mengumpulkan data melalui dokumen seperti koran, literature dan jurnal terkait dengan islam dan radikalisme.

HASIL PENELITIAN

Genealogi Radikalisme

Radikalisme sering diasosiasikan dengan pandangan atau tindakan yang identik dengan penggunaan kekerasan, padahal pada dasarnya memiliki makna yang netral. Seperti, untuk mencapai kebenaran dalam studi filsafat haruslah dicari hingga akar- akarnya (radikal), radix. Akan tetapi, ketika istilah ini dilekatkan dengan isu terorisme maka radikalisme bermakna negatif. Kemudian radikalisme identik dengan kekerasan, dipersepsikan sebagai anti-sosial. Terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa seseorang akan bersikap radikal atau melawan dan siap berkorban demi mempertahankan dirinya. Perlawanan dapat muncul dari orang yang lemah atau terancam sehingga ia akan menggunakan segala kekuatannya untuk mempertahankan diri. Jadi perlawanan muncul ketika orang merasa terancam. Dilain pihak, orang terancam yang berada dalam posisi lebih kuat maka ia bisa menindas dan jika berada pada posisi yang lemah maka ia akan melawan dan menantang. Salah satu alasan mengapa seseorang merasa terancam karena mereka memiliki alasan ideologis (Hidayat, 2012).

Istilah radikalisme sendiri diambil dari kata dasar radikal dalam bahasa Latin yakni radix yang berarti akar. Roger Scruton mendefinisikan bahwa radikal "...is one who wishes to take his political ideas to their roots, and to affirm in a thoroughgoing way the doctrines that are delivered by that exercise" (Scruton, 2007:576-577). Menurutnya, radikal dikaitkan dengan orang yang ingin membawa ide-ide politik ke akar-akarnya dan dipertegas dengan doktrin-doktrin yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Selanjutnya ia menyatakan bahwa radikal cenderung memusuhi status quo dan ingin sekali mendesakkan perubahan. Jika dikembalikan kepada istilah radikalisme adalah gerakan yang ingin membawa ide-ide politik ke akar-akarnya dibarengi doktrin-doktrin tertentu untuk mendesakkan perubahan dalam suatu masyarakat.

Konsep Radikalisme sendiri, kadang dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme diartikan sebagai gerakan-~~gerakan keagamaan yang~~ berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan jalan kekerasan (Rubaidi, 2007:33). Sedangkan radikalisme agama, bertolak dari gerakan politik yang mendasarkan diri pada suatu doktrin keagamaan yang paling fundamentalis, secara penuh dan literal bebas dari kompromi, penjinaan, dan reinterpretasi (penafsiran) (Azra, 1993:4).

Bila dicermati secara mendalam, radikalisme berpangkal pada ideologi. Stephen Crook kemudian menyatakan bahwa radikalisme dapat dijodohkan dengan radikalisme politik, karena titik pangkalnya konflik adalah ideologi (Crook, 1991:4). Agus Surya Bakti menilai faktor ideologi ini tidak berdiri sendiri, ia bersahutan dengan faktor pemicu yang multivariabel. Terdapat rumusan bahwa jika ideologi tidak bertemu dengan faktor pemicu (trigger) yang serba kompleks ini, maka niscaya aksi terorisme akan sulit untuk terjadi. Artinya, radikalisme muncul dengan berbagai penyebab.



Keterbelakangan pendidikan, perubahan politik, kemiskinan atau rendahnya peradaban budaya dan sosial seseorang akan memicu radikalisme yang bisa berujung pada terorisme (Bakti, 2016:40-50). Penelitian yang dilakukan Bambang Pranowo terhadap 590 guru (327 guru PAI SMP dan 263 guru PAI SMA) serta terhadap 993 siswa (401 siswa SMP & 592 SMA) pada tahun 2010 (Pranowo, 2010) menunjukkan, bahwa radikalisme di benak siswa dan guru yang ditelitinya, sudah pada taraf mengkhawatirkan. Kesiapan siswa dan guru dalam perilaku radikal, meski tidak mencapai angka tertinggi dalam prosentase, namun fakta dalam penelitian tersebut membuktikan bahwa radikalisme khususnya di kalangan pendidikan, perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena jika tidak, maka ada potensi terorisme banyak di masa yang akan datang.

Radikalisme di Indonesia selalu dikaitkan dengan radikalisme politik menurut Vedi R. Hadis. Ia meminta kehati-hatian dalam membuat definisi politik radikal ini. Politik radikal di Indonesia ini selalu dikaitkan dengan radikal Islam, karena tinjauan sosial dan historis politik di Indonesia. Kehati-hatian ini diperlukan, karena bicara tentang radikalisme akan sangat mudah berkonotasi fundamentalisme, militan atau Islamist. (Hadiz, 2008). Penelitian Alexander R. Arifianto tentang radikalisme di kampus-kampus di Indonesia memperlihatkan bahwa radikalisme ada pada tataran ide, tetapi tidak dalam tataran implementasi. Arifianto membenarkan bahwa sejumlah aktifitas kampus dan lembaga didalamnya sudah dijangkau oleh Hizbut Tahir Indonesia (HTI). politik. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menjadi perpanjangan dakwah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Arifianto mengungkapkan kegiatan kampus yang diduga radikal, ternyata agendanya tetap moderat dan menolak kekerasan. Radikalisme dalam pemahaman tidak terwujud dalam agenda aksi (Arifianto, 2018:1-20). Hikam menyebut, gerakan terorisme dapat muncul sebagai akibat ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi. Munculnya fenomena terorisme, semakin muncul ketika negara sedang mengalami kesulitan ekonomi, atau bahkan wilayahnya sedang mengalami kesejahteraan yang tidak merata (Hikam, 2016:64). Kenyataan ini diperkuat oleh temuan yang memperlihatkan radikalisme dapat disebabkan oleh kegagalan bangsa-bangsa tertentu melakukan modernisasi (Siva, 2003:28). Penduduk perdesaan masuk ke kota-kota dan tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang memuaskan. Mereka hidup di daerah-daerah kumuh yang rawan penyakit, di mana pemerintah menyediakan hanya sedikit, kalau ada, pendidikan, layanan sosial, dan sanitasi bagi mereka. Mereka tidak mendapatkan manfaat-manfaat modernisasi dengan memadai, lantas lahirlah anomie. Situasi seperti ini dengan mudah dapat memunculkan protes sosial dan penggunaan kekerasan dalam masyarakat.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, maka ada faktor lain yang penting untuk dicermati sebagai faktor penting pencegahan dan penangkalan terhadap berkembangnya radikalisme, yakni faktor kebudayaan. Bisa disebut, bahwa faktor budaya sangat penting dalam rangka untuk pintu masuk jalan menuju program deradikalisasi. Dalam hal ini, strategi kebudayaan dapat dimanfaatkan untuk menekan potensi radikalisme. Kebudayaan di suku bangsa Indonesia sendiri, menurut Bakti,



berumur lebih tua dari agama-agama yang ada. Salahsatu ciri khas yang ada di semua suku di Indonesia adalah penekanannya yang menonjol pada aspek keselarasan atau harmoni. Ini menjadi satu pilar penting bagi pengembangan deradikalisasi terorisme dari perspektif nilai-nilai tradisi dan kearifan local (Bakti, 2008:182).

Jelas sudah, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa munculnya radikalisme yang dimotivasi oleh ideologi sekalipun, namun jika tidak bertemu dengan pemicu berupa permasalahan kesejahteraan yang tidak merata maka fenomena kekerasan tidak akan terjadi. Dengan demikian, salah satu kunci untuk mencegah dan menangkal radikalisme dan terorisme adalah dengan memenuhi kebutuhan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dalam pandangan ini mengisyaratkan adanya kehadiran negara yang diwujudkan sebagai “kapasitas negara”.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, kapasitas negara yang efektif menyiratkan kemampuan untuk menyediakan barang dan layanan publik tertentu, terutama hukum dan ketertiban, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pemberian bantuan kepada orang miskin. Dengan melakukan hal-hal itu, negara punya kehadiran. Radikalisme sering juga dimunculkan oleh eksklusi sosial kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang dapat memupuk tampilnya ideologi-ideologi anti sistem, kemungkinan diperparah pula oleh pendekatan refresif yang dilakukan oleh aparat negara. Oleh karena itu, alternatif upaya deradikalisasi dapat dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan persuasif yang melibatkan seluruh komponen atau stakeholder di masyarakat. Selain itu pula dibutuhkan adanya pembinaan ideologis terhadap seluruh warga negara Indonesia secara sistemik dan terencana dengan baik. Tanpa adonan tersebut, penangkalan radikalisme akan mustahil bisa dilakukan.

Batasan Radikalisme untuk Indonesia

Dalam penelitian ini ditemukan adanya berbagai pandangan atau pendapat tentang radikalisme. Diantara ragam pendapat tersebut menyatakan bahwa radikalisme merupakan pemahaman yang dihasilkan dari respons atas permasalahan disekitar kehidupan manusia atau salah satu cara sebuah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Poin kunci memahami radikalisme adalah cara pandang mendasar dalam merespons berbagai persoalan disekitarnya. Dengan demikian, istilah radikalisme tidak harus selalu dimaknai secara negatif. Terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa radikalisme itu bisa bersifat negatif atau pun positif. Istilah radikalisme tidak dianggap sesuatu yang amat penting untuk dipermasalahkan sekarang ini sebab sudah dianggap ketinggalan jaman. Alasan utamanya adalah radikalisme berasal bahasa Latin yang berarti akar, memahami sesuatu secara mengakar dan lebih bersifat kedalam bukan keluar. Radikalisme adalah satu bentuk fanatisme atas satu pemahaman yang bisa positif bisa negatif tergantung kemana arah radikalisme dimaksud. Radikalisme dapat bermakna positif jika dipagari oleh sikap toleransi atau sikap menahan diri dalam masyarakat. Kata kuncinya adalah bahwa radikalisme “harus” dibalut dengan “toleransi” Artinya radikalisme harus lebih banyak bersifat kedalam, bukan keluar.



Pendapat di atas sejalan dengan pengertian radikalisme dari perspektif akademik bahwa pada dasarnya terdapat dua tipe radikalisme yakni radikalisme konstruktif dan radikalisme destruktif, mirip penyebutan istilah radikalisme positif dan negatif. Oleh karenanya, tidak selalu yang disebut kaum atau paham radikal itu negatif. Dwitunggal Soekarno dan Hatta disebut kaum radikal karena mereka adalah pemimpin dalam menuntut dan memperjuangkan kemerdekaan RI, melawan dan mengusir penjajah melalui perang atau pun diplomasi politik. Sedangkan radikalisme yang negatif adalah cara berpikir atau cara pandang yang ingin melakukan perubahan mendasar dan struktural dengan menjungkirbalikkan tatanan-tatanan yang ada, melalui cara-cara kekerasan dan tidak manusiawi. Akan tetapi paham radikalisme yang negatif bisa menjadi ancaman bagi semua orang.

Radikalisme dilihat pula sebagai sebuah penyimpangan sosial atau sesuatu yang tidak normal, pemahaman dalam masyarakat yang menghendaki adanya suatu perubahan tetapi dengan cara yang tidak normal. Selanjutnya dijelaskan bahwa cara tidak normal artinya perubahan tersebut secara instan atau tidak dengan cara gradual dalam waktu singkat serta melabrak aturan-aturan yang ada.

Radikalisme biasanya mempunyai keinginan dan tujuan yang kuat untuk merubah sesuatu. Sedangkan perubahannya itu bukannya tidak boleh tetapi ada aturan mainnya. Keinginan perubahan dengan cepat dan sesegera mungkin disertai pemahaman radikal adalah radikalisme. Radikalisme diawali dengan pemahaman radikal dilanjutkan dengan tindakan-tindakan tertentu. Umpamanya, kedangkalan pemahaman tentang agama oleh seseorang atau kelompok tertentu tetapi menganggap keyakinan mereka adalah paling benar dan mendesakkan perubahan sosial-politik sesegera mungkin dengan aksi-aksi kekerasan dalam masyarakat berdasarkan keyakinan itu. Agen-agen garis keras pada dasarnya memiliki pemahaman yang dangkal tentang agama (Wahid, 2009:204). Contohnya, aksi pengeboman untuk mendesakkan perubahan ideologis merupakan cara-cara radikal.

Radikalisme dapat pula dibedakan antara sebagai sebuah pengetahuan, sikap atau perilaku. Dengan demikian, radikalisme bukanlah sesuatu yang passive sebab dapat memberikan dorongan konsekuensi atas tindakan-tindakan. Dalam psikologi, knowledge mulai bergerak keluar ketika terlihat sebagai attitude serta tampak pada behaviour. Lanjut dalam psikologi, behaviour meliputi dari kepala sampai kaki. Sedangkan orang fisika melihat aktivitas otak pun adalah behavior. Jadi political doktrin sociopolitical adalah ciri umum yang mewarnai definisi radikalisme. Berdasarkan berbagai pendapat di atas, radikalisme pada dasarnya adalah suatu paham atau cara pandang. Ketika ia hanya sebagai sudut pandang, maka radikalisme ini tidak tampak dan tidak perlu dihakimi. Namun perilaku radikal atau tidaknya seseorang diperlihatkan jika orang melakukan tindakan-tindakan perlawanan dengan sangat keras/fanatik.

Dari ulasan-ulasan di atas, terdapat kaitan yang dapat ditarik sebagai sebuah pengertian secara umum:

1. Radikalisme ini bisa diartikan positif atau negative atau berbentuk konstruktif dan deskruktif.



2. Radikalisme bermakna positif atau konstruktif jika dipagari oleh sikap toleransi atau sikap menahan diri dalam masyarakat.
3. Radikalisme negatif atau deskruktif adalah pemahaman atau tindakan yang memiliki tujuan kuat untuk terwujudnya perubahan secara cepat atau pun upaya mempertahankan sesuatu dengan sangat fanatik, bisa jadi dibarengi penggunaan kekerasan agar bisa mencapai tujuannya.

Di Indonesia, radikalisme berkembang dengan alasan-alasan sebagai berikut: Pertama, alasan personal yakni radikalisme bisa berkembang sebab urusan ideologi maupun kebutuhan finansial. Kedua, adanya propaganda politik yang menarik. Ketiga, alasan religius yang kuat sehingga terlibat dalam lingkaran radikalisme. Dan terakhir, Keempat, ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Radikalisme ada 3 point, yaitu (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; (3) sikap ekstrem. Berdasarkan sumber-sumber referensi dan pembahasan terdahulu, dengan adanya berbagai pandangan dan pendapat diperlukan kesamaan pengertian dan sudut pandang tentang istilah radikalisme di Indonesia. Untuk menghindari kesimpangsiuran pemahaman terhadap istilah tersebut maka penelitian ini merumuskan bahwa radikalisme adalah bentuk pemahaman yang mendasar berdasarkan pengetahuan pada umumnya dan atau ideologis yang dapat bersifat konstruktif (positif) dan deskruktif (negatif).

Sedangkan dalam rangka regulasi anti terorisme atau deradikalisasi di Indonesia, dikenal istilah “paham radikal teroris” dalam bentuk lisan, tulisan dan media literasi lainnya atau radikalisme yang sifatnya negatif. Oleh karena itu, untuk kepentingan deradikalisasi dan kebijakan anti radikalisme/terorisme dirumuskan definisi sesuai dengan Indonesia, maka dirumuskan “gerakan yang ingin membawa ide-ide politik ke akar-akarnya dibarengi doktrin-doktrin tertentu dengan fanatisme dan tidak toleran untuk melakukan penentangan atas paham lainnya dan untuk mendesakkan perubahan secara cepat dibarengi dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Kaum Muda dan Aksi Kekerasan

Rentannya pemuda terhadap aksi kekerasan dan terorisme patut menjadi keprihatinan bersama. Di Jakarta misalnya terdapat 0,5 % dari 7200 siswa yang mengatakan bahwa bom bunuh diri adalah jalan perjuangan. Banyak faktor yang menyebabkan para pemuda terseret ke dalam tindakan terorisme, mulai dari kemiskinan, kurangnya pendidikan agama yang damai, gencarnya infiltrasi kelompok radikal, lemahnya semangat kebangsaan, kurangnya pendidikan



kewarganegaraan, kurangnya keteladanan, dan tergerusnya nilai kearifan lokal oleh arus modernitas negatif. Apapun faktor yang melatari, adalah tugas kita bersama untuk membentengi mereka dari radikalisme dan terorisme. Dari uraian upaya-upaya kongkrit di atas, sejatinya ada beberapa hal yang patut dikedepankan dalam pencegahan terorisme di kalangan pemuda. Pertama, memperkuat pendidikan kewarganegaraan (civic education) dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Melalui pendidikan kewarganegaraan, para pemuda didorong untuk menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal seperti toleransi antar-umat beragama, kebebasan yang bertanggungjawab, gotong royong, kejujuran, dan cinta tanah air sertakepedulian antar-warga masyarakat. Kedua, mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya, maupun olahraga. Kegiatan-kegiatan positif ini akan memacu mereka menjadi pemuda yang berprestasi dan aktif berorganisasi di lingkungannya sehingga dapat mengantisipasi pemuda dari pengaruh ideologi radikal terorisme. Ketiga, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Dalam hal ini, partisipasi guru agama di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting. Pesan-pesan damai dari ajaran agama perlu dikedepankan dalam pelajaran maupun ceramah-ceramah keagamaan. Keempat, memberikan keteladanan kepada pemuda. Sebab, tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia. Para tokoh masyarakat harus dapat menjadi role model yang bisa diikuti dan diteladani oleh para pemuda.

PENUTUP

Radikalisme bisa diartikan positif atau negative atau berbentuk konstruktif dan deskruktif. Radikalisme bermakna positif atau konstuktif jika dipagari oleh sikap toleransi atau sikap menahan diri dalam masyarakat. Radikalisme negatif atau deskruktif adalah pemahaman atau tindakan yang memiliki tujuan kuat untuk terwujudnya perubahan secara cepat atau pun upaya mempertahankan sesuatu dengan sangat fanatik, bisa jadi dibarengi penggunaan kekerasan agar bisa mencapai tujuannya. Secara umum, radikalisme adalah bentuk pemahaman yang mendasar berdasarkan pengetahuan pada umumnya atau ideologis yang dapat bersifat konstruktif (positif) dan deskruktif (negatif). Dan untuk kepentingan deradikalisasi dan kebijakan anti radikalisme/terorisme dirumuskan definisi sesuai dengan Indonesia, maka dirumuskan: Radikalisme adalah “gerakan yang ingin membawa ide-ide politik ke akar-akarnya dibarengi doktrin-doktrin tertentu dengan fanatisme dan tidak toleran untuk melakukan penentangan atas paham lainnya dan untuk mendesakkan perubahan secara cepat dibarengi dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau



kehancuran terhadap objek vital yang strategis lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

DAFTAR PUSTAKA

- A Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama, Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2007.
- Alexander R. Arifianto, *Islamic Campus Preaching Organizations in Indonesia; Promoters of Moderation or Radicalism?*, Asian Security, Vol. 1-20, Tahun 2018.
- Agus Surya Bakti, *Deradikalisasi Nusantara, Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme*, Jakarta, Daulat Press Jakarta, Jakarta, 2016.
- Azyumardi Azra, *Memahami Gejala Fundamentalisme*, Jurnal Ulumul Qur'an, No. 3 volume IV, 1993.
- Bambang Pranowo, *Pendidikan dan Tantangan Radikalisme*, Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian, 2010.
- BNPT. *Laporan hasil survei nasional Daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme tahun 2017*. Jakarta.
- Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture; Selected Essays*. New York. Basic Books Inc. 1973.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- K H. Aburrahman Wahid (Ed), *Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Transnasional Islam di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- Muhammad AS Hikam, *Deradikalisasi, Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016.
- Emanuel Sivan, “The Clash within Islam,” *Survival* 45, no. 1. Spring, 2003.
- Hasbiyallah Dkk, *Deradikalisasi Islam Indonesia; Studi Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama Laporan Penelitian Kelompok*. Bandung; Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.
- Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan.*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010.
- Julie Cernov Hwang, (terj), *Umat Bergerak Mobilisasi Damai Kaum Islamis*. Jakarta; Freedom Institute 2011.
- Julia Day Howeel, *Between ‘Jihad’ and ‘Mcworld’ Engaged Sufism in Indonesia*, dalam, Shahram Akbarzadeh dan Fethi Mansouri, (eds)., *Islam and Political Violence; Muslim Diaspora and Radicalims in the West*, London, Tauris Academic Studies, 2007.
- Mohammad Hasan Khalil, *Jihad, Radicalism, and the New Atheism*. Cambridge; Cambridge University Press, 2018.



Rene Ferguson, "Teacher Development for Religion and cultural diversity in Citizenship Education: A Community Approach". Unpublish PHD Dissertation, Stellenbosch University, 2011.

Roger Scruton , Dictionary of Political Thought. The Palgrave Macmillan, 2007. 3rd ed.

